

Strategi Peningkatan Kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Perbatasan Indonesia – Timor Leste

I Wayan Suartha¹ Eko Setijo Pudjiantoro² Almuchalif Suryo³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: wayancaj2009@gmail.com¹ ekosp.12273p@gmail.com² suryojayapura@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dihadapkan pada kondisi geografis, keterbatasan sarana prasarana, pelintas batas ilegal, penyelundupan, serta dinamika sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aktual kemampuan Satgas Pamtas TNI AD, mengidentifikasi faktor kendala, serta merumuskan strategi peningkatan kemampuan dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Timor Leste dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap informan kunci, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan Satgas Pamtas secara umum cukup baik, tetapi belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana, komunikasi, teknologi pengawasan, kondisi geografis, dan koordinasi lintas instansi. Strategi peningkatan dilakukan melalui penguatan personel, latihan pratugas, optimalisasi operasi, pemanfaatan teknologi pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Keywords: Strategi, Satgas Pamtas, Kemampuan, Kedaulatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki arti penting bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Kondisi geografis yang kompleks, aktivitas pelintas batas ilegal, penyelundupan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta dinamika sosial masyarakat perbatasan menjadi tantangan dalam mewujudkan pengamanan wilayah yang efektif. Dalam konteks tersebut, Satgas Pamtas TNI AD memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung terpeliharanya kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menuntut kemampuan personel yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan fisik, tetapi juga kemampuan adaptasi, komunikasi sosial, pengambilan keputusan, serta kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai persoalan pengelolaan dan keamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Mangku dan Dimaswari (2021) mengkaji problematika perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, khususnya berkaitan dengan persoalan batas wilayah dan upaya penyelesaiannya. Tambunan et al. (2023) membahas strategi pemerintah Indonesia dalam menangani pelintas batas ilegal dan menekankan pentingnya penguatan fasilitas perlintasan serta mekanisme kerja sama bilateral. Sementara itu, Djong dan Damayanti (2023) menunjukkan bahwa pengamanan kawasan perbatasan juga dihadapkan pada persoalan penyelundupan dan memerlukan pengawasan serta patroli yang lebih efektif. Penelitian lain mengenai ancaman keamanan nasional di perbatasan Indonesia-Timor Leste juga menunjukkan bahwa perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan aktivitas lintas batas ilegal menjadi faktor yang memengaruhi kerawanan kawasan tersebut.

Penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwa pengamanan perbatasan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kemampuan satuan tugas pengamanan perbatasan TNI AD sebagai aktor operasional di lapangan serta strategi peningkatan kemampuannya masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan perbatasan, penyelesaian persoalan batas wilayah, pelintas batas ilegal, penyelundupan, atau peran lembaga pemerintah. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana kemampuan aktual Satgas Pamtas dalam menghadapi karakteristik medan, keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi pengawasan, serta dinamika sosial masyarakat perbatasan.

Gap penelitian dalam artikel ini terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai kemampuan personel Satgas Pamtas dengan strategi peningkatan kemampuan yang mempertimbangkan aspek militer, teknologi, dan sosial secara bersamaan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengidentifikasi kondisi dan kendala kemampuan Satgas Pamtas, tetapi juga merumuskan strategi peningkatan kemampuan berdasarkan kondisi operasional di wilayah perbatasan. Pendekatan tersebut penting karena efektivitas pengamanan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis prajurit, tetapi juga oleh kesiapan personel, dukungan sarana prasarana, teknologi pengawasan, pola operasi, koordinasi lintas instansi, serta hubungan dengan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengamanan perbatasan yang lebih adaptif, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan kemampuan Satgas Pamtas, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan Satgas Pamtas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kondisi aktual kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, faktor-faktor yang menjadi kendala, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada wilayah perbatasan darat Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) selama periode Mei 2025 sampai dengan April 2026. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan personel, pelaksanaan operasi pengamanan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta hubungan sosial dengan masyarakat di wilayah perbatasan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan dan kondisi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur komando satuan, prajurit yang melaksanakan tugas di lapangan, dan tokoh masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan serta dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan kendala yang dihadapi Satgas Pamtas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif pada pos-pos perbatasan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan, pelaksanaan tugas, karakteristik medan, serta aktivitas pengamanan. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada sembilan informan kunci yang berasal dari unsur komando satuan, prajurit lapangan, dan tokoh masyarakat. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan teknis, fisik, intelektual, dan sosial personel, kendala operasional, dukungan organisasi, koordinasi lintas instansi, serta strategi peningkatan kemampuan. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi yang berkaitan dengan operasi dan penugasan pengamanan perbatasan. Penggunaan ketiga teknik tersebut dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan keabsahan data penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian untuk mengidentifikasi kondisi aktual kemampuan Satgas Pamtas, faktor-faktor kendala, dan alternatif strategi peningkatan kemampuan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan dan konsistensi temuan dari berbagai sumber data. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik sehingga informasi yang diperoleh dari wawancara dapat dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis penelitian selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan Satgas Pamtas dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan. Kondisi kemampuan dianalisis berdasarkan aspek teknis, fisik, intelektual, dan adaptasi sosial, sedangkan faktor kendala dianalisis berdasarkan aspek internal dan eksternal. Perumusan strategi peningkatan kemampuan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sumber daya (*Means*) sehingga strategi yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kondisi operasional dan karakteristik wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Timor Leste. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap sembilan informan kunci, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan secara umum berada pada kategori cukup baik. Kemampuan tersebut terlihat dari penguasaan prosedur pengamanan, ketahanan fisik dalam menghadapi medan perbukitan, kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan, serta kemampuan membangun komunikasi sosial dengan masyarakat perbatasan.

Pada aspek kemampuan teknis, personel menunjukkan penguasaan terhadap prosedur patroli dan penjagaan pos. Kemampuan fisik personel mendukung pelaksanaan tugas pada medan perbukitan yang berat dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Personel juga menunjukkan kemampuan adaptasi sosial dan budaya melalui pendekatan persuasif serta pembinaan teritorial kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam pelaksanaan tugas, personel menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan taktis dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan. Pada aspek kemampuan intelektual dan sosial, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kebutuhan penguatan pengetahuan mengenai hukum lintas batas dan sensitivitas terhadap karakteristik budaya masyarakat setempat. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter masyarakat perbatasan yang memiliki hubungan kekerabatan lintas

negara. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa komunikasi sosial dan pendekatan persuasif menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah perbatasan.

Hasil penelitian juga menemukan sejumlah kendala yang memengaruhi pelaksanaan tugas. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas, sistem rotasi tugas, serta keterbatasan fasilitas dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan komunikasi. Keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah tanggung jawab menyebabkan personel melaksanakan berbagai fungsi, mulai dari patroli, penjagaan, hingga kegiatan pendekatan kepada masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan dengan beban fisik dan mental personel selama pelaksanaan penugasan. Kendala eksternal ditemukan pada kondisi geografis dan karakteristik sosial wilayah perbatasan. Medan yang berbukit, hutan yang lebat, dan kondisi cuaca yang tidak menentu menyulitkan pengawasan terhadap jalur tidak resmi. Selain itu, masyarakat perbatasan memiliki hubungan keluarga lintas negara dan kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran batas wilayah tidak seluruhnya berkaitan dengan aktivitas kriminal, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan adat dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengamanan, ditemukan pula keterbatasan sarana transportasi, sistem komunikasi, dan teknologi pengawasan. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap jangkauan patroli dan kecepatan koordinasi antarpos. Koordinasi antara Satgas Pamantas dan instansi terkait juga belum sepenuhnya terintegrasi dan masih menunjukkan pola sektoral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Pamantas telah melakukan pemetaan sektor prioritas dan pendekatan kepada masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan. Pendekatan budaya digunakan dalam membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Pada tingkat operasional, pelaksanaan pengamanan juga mencakup patroli dinamis berdasarkan tingkat kerawanan, komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait. Temuan penelitian mengenai strategi peningkatan kemampuan menunjukkan beberapa aspek utama, yaitu penguatan kapasitas personel, peningkatan kualitas latihan praturgus, peningkatan kepemimpinan lapangan, optimalisasi pola operasi, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti drone, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat perbatasan. Dukungan sumber daya yang ditemukan dalam penelitian meliputi pemerataan kemampuan personel, transportasi taktis, sistem komunikasi pada wilayah *blank spot*, dan dukungan logistik yang disesuaikan dengan kondisi geografis.

Table 1. Temuan Utama Penelitian

No	Aspek yang Diamati	Total number of teachers (%)
1	Kemampuan teknis	Personel menguasai prosedur patroli dan penjagaan pos
2	Kemampuan fisik	Personel mampu melaksanakan tugas pada medan perbukitan dan kondisi cuaca yang tidak menentu
3	Kemampuan intelektual	Pengetahuan mengenai hukum lintas batas masih perlu diperkuat
4	Kemampuan sosial	Personel menunjukkan kemampuan adaptasi sosial dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
5	Personel	Jumlah personel terbatas dibandingkan dengan luas wilayah tanggung jawab
6	Sarana dan prasarana	Terdapat keterbatasan fasilitas pos, transportasi, listrik, dan air bersih
7	Komunikasi	Masih terdapat wilayah <i>blank spot</i> dan keterbatasan sistem komunikasi
8	Teknologi	Pemanfaatan teknologi pengawasan modern masih terbatas
9	Kondisi geografis	Medan berbukit, hutan lebat, dan cuaca tidak menentu menghambat pengawasan
10	Koordinasi	Koordinasi lintas instansi belum sepenuhnya terintegrasi

No	Aspek yang Diamati	Total number of teachers (%)
11	Masyarakat	Hubungan sosial dan kekerabatan lintas negara memengaruhi dinamika perbatasan
12	Operasi	Patroli dinamis dan pemetaan sektor prioritas telah diterapkan
13	Strategi peningkatan	Penguatan personel, latihan pratugas, teknologi pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi temuan strategis

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Satgas Pamtas TNI AD telah mendukung pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan, terutama pada aspek teknis, fisik, dan adaptasi sosial. Namun, kemampuan tersebut belum mencapai tingkat optimal karena masih ditemukan keterbatasan personel, sarana prasarana, komunikasi, teknologi pengawasan, kondisi geografis, serta koordinasi lintas instansi.

Discussion

Kondisi Kemampuan Satgas Pamtas dalam Menjaga Keamanan Perbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste berada pada kategori cukup baik. Kemampuan tersebut terlihat dari penguasaan teknis dalam pelaksanaan patroli dan penjagaan pos, ketahanan fisik dalam menghadapi medan perbatasan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya, serta kemampuan mengambil keputusan taktis di lapangan. Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas operasional karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan organisasi, sarana prasarana, komunikasi, dan teknologi pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan personel merupakan salah satu unsur penting dalam pengamanan perbatasan, tetapi kemampuan individu tidak berdiri sendiri. Dalam perspektif teori kemampuan, kemampuan teknis, fisik, intelektual, dan adaptasi perlu didukung oleh sumber daya organisasi agar dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa personel telah memiliki kemampuan dasar yang memadai, tetapi keterbatasan transportasi, fasilitas pos, sistem komunikasi, dan teknologi pengawasan membatasi jangkauan dan kecepatan pelaksanaan tugas. Dengan demikian, persoalan kemampuan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kompetensi prajurit, tetapi juga dengan kesesuaian antara kemampuan personel dan dukungan sumber daya yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tampubolon et al. yang menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Pamtas memiliki posisi penting dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste, tetapi pelaksanaan tugas membutuhkan dukungan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Penelitian tersebut juga menempatkan Satgas Pamtas sebagai unsur penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung hubungan dan kerja sama kedua negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kualitas kemampuan personel perlu berjalan bersama dengan pemenuhan dukungan operasional.

Kendala Geografis, Personel dan Sarana Prasarana

Penelitian menemukan bahwa keterbatasan personel dibandingkan dengan luas wilayah tanggung jawab menjadi salah satu kendala utama. Kondisi tersebut menyebabkan personel melaksanakan beberapa fungsi secara bersamaan, mulai dari patroli, penjagaan pos, hingga pendekatan kepada masyarakat. Selain itu, kondisi medan berupa perbukitan, hutan lebat, dan cuaca yang tidak menentu meningkatkan kesulitan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi. Temuan ini memiliki hubungan erat dengan karakteristik perbatasan Indonesia-Timor Leste sebagai wilayah yang memiliki akses lintas batas dan kondisi geografis yang kompleks. Penelitian Tambunan et al. (2023) menemukan bahwa luasnya wilayah perbatasan

menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas perlintasan dan keberadaan jalur alternatif menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelintas batas ilegal. Persamaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan perbatasan tidak hanya berasal dari perilaku pelintas batas, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pengawasan dan karakteristik ruang perbatasan. Perbedaannya, penelitian Tambunan et al. lebih menitikberatkan pada strategi pemerintah dalam menangani pelintas batas ilegal, sedangkan penelitian ini menghubungkan persoalan tersebut secara langsung dengan kemampuan operasional Satgas Pamtas. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan kapasitas personel, dukungan sarana, komunikasi, dan teknologi sebagai bagian dari faktor yang menentukan efektivitas pengamanan di lapangan.

Dinamika Sosial Masyarakat Perbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan. Hubungan kekerabatan lintas negara, kebutuhan ekonomi, dan kepentingan adat memengaruhi aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam beberapa kondisi, aktivitas pelanggaran batas tidak sepenuhnya berkaitan dengan kriminalitas, tetapi juga berhubungan dengan hubungan keluarga, adat, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, personel menggunakan pendekatan persuasif dan komunikasi sosial dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan relevansi teori keamanan nasional yang memandang keamanan perbatasan sebagai persoalan multidimensional. Pengamanan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan wilayah secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan berpotensi tidak mampu menjelaskan seluruh bentuk aktivitas lintas batas yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki hubungan historis dan kekerabatan lintas negara. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mahendrawati et al. (2021) mengenai penegakan hukum terhadap transaksi bisnis ilegal di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum di wilayah perbatasan memiliki dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Temuan penelitian ini memperkuat perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa kemampuan sosial personel dan pendekatan kepada masyarakat menjadi bagian dari kemampuan pengamanan perbatasan.

Teknologi Pengawasan dan Penguatan Kemampuan Operasional

Keterbatasan teknologi pengawasan menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau menyebabkan pengawasan berbasis patroli fisik memiliki keterbatasan jangkauan. Penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi pengawasan seperti drone menjadi salah satu strategi yang dibahas untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pengawasan wilayah. Selain itu, keterbatasan sistem komunikasi pada wilayah *blank spot* juga menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan koordinasi antarpos. Dalam perspektif teori manajemen teknologi dan intelijen, teknologi berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kemampuan memperoleh informasi, memperluas jangkauan pengawasan, dan mempercepat respons terhadap perkembangan situasi. Oleh karena itu, modernisasi teknologi pengawasan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kemampuan personel. Teknologi membutuhkan personel yang mampu mengoperasikan, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi yang dihasilkan dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sutadi et al. (2022) yang secara khusus membahas penggunaan pesawat tanpa awak dalam mendukung operasi pengamanan wilayah perbatasan darat RI–RDTL. Hasil penelitian tersebut menempatkan teknologi pesawat tanpa awak sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan pengamanan perbatasan. Dalam penelitian ini, penggunaan drone ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari strategi peningkatan kemampuan Satgas yang juga mencakup peningkatan kompetensi personel, pola operasi, komunikasi, dan koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian teknologi dengan penguatan kapasitas manusia dan organisasi, bukan menempatkan teknologi sebagai solusi yang berdiri sendiri.

Koordinasi Lintas Instansi sebagai Faktor Penguatan Pengamanan

Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi masih belum sepenuhnya terintegrasi. Pelaksanaan pengamanan perbatasan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengamanan perbatasan merupakan aktivitas yang melampaui kapasitas satu institusi. Temuan tersebut sesuai dengan prinsip Collaborative Governance yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian persoalan publik yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi diperlukan karena bentuk ancaman di wilayah perbatasan tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga pelintas batas ilegal, penyelundupan, persoalan sosial, dan aktivitas ekonomi lintas batas. Hasil penelitian Rokhanyah et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya kolaborasi kebijakan antara Indonesia dan Timor-Leste dalam mengurangi penyelundupan di wilayah perbatasan. Penelitian tersebut menempatkan kerja sama dan diplomasi perbatasan sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan perbatasan dan hubungan kedua negara. Sementara itu, penelitian Adiwisuda mengenai penanganan kejahatan transnasional di perbatasan Indonesia–Timor Leste menempatkan peran TNI dalam konteks ancaman keamanan transnasional dan kebutuhan pendekatan yang bersifat kontekstual. Penelitian ini memperluas kedua perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi bukan hanya diperlukan untuk menangani pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kemampuan operasional Satgas melalui pertukaran informasi, respons bersama, dan penguatan deteksi dini.

Strategi Peningkatan Kemampuan Berdasarkan *Ends, Ways* dan *Means*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kemampuan Satgas Pamtas mencakup tiga komponen utama, yaitu tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sumber daya (*Means*). *Ends* diarahkan pada terciptanya keamanan wilayah yang efektif dan berkelanjutan melalui peningkatan pengawasan jalur tidak resmi, deteksi dini, stabilitas masyarakat, dan kesiapan personel. *Ways* dilakukan melalui patroli dinamis, komunikasi sosial, koordinasi lintas instansi, serta latihan dan penguatan kepemimpinan lapangan. Sementara itu, *Means* mencakup personel, transportasi, komunikasi, dan dukungan logistik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kemampuan tidak dapat dilakukan melalui satu intervensi saja. Penambahan teknologi tanpa peningkatan kompetensi personel tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Demikian pula peningkatan jumlah personel tanpa dukungan komunikasi, transportasi, dan fasilitas operasional tidak secara otomatis menghilangkan hambatan geografis. Oleh karena itu, efektivitas strategi ditentukan oleh keselarasan antara tujuan yang hendak dicapai, cara yang digunakan, dan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks penelitian terdahulu, pendekatan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang berfokus pada satu dimensi pengamanan perbatasan. Kajian mengenai pelintas

batas ilegal menekankan penguatan fasilitas perlintasan dan mekanisme kerja sama bilateral, sedangkan kajian mengenai teknologi menekankan pemanfaatan pesawat tanpa awak. Penelitian ini mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan aspek sumber daya manusia, pola operasi, komunikasi, dan pendekatan sosial. Integrasi tersebut menjadi kontribusi praktis penelitian dalam merumuskan strategi peningkatan kemampuan Satgas Pamtas secara multidimensional.

Novelty dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, novelty penelitian ini terletak pada model peningkatan kemampuan Satgas Pamtas yang mengintegrasikan empat unsur kemampuan personel—teknis, fisik, intelektual, dan sosial—dengan tiga unsur strategi Ends, Ways, dan Means dalam konteks pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Pendekatan tersebut menempatkan personel, teknologi, pola operasi, koordinasi lintas instansi, dan masyarakat perbatasan sebagai satu kesatuan dalam strategi pengamanan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori kemampuan dan teori strategi dalam konteks pengamanan perbatasan dengan menunjukkan bahwa kemampuan operasional tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh keterpaduan tujuan, cara, dan sumber daya. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi peningkatan latihan praturgas berbasis karakteristik medan, penguatan kepemimpinan lapangan, pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan sistem komunikasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Dengan demikian, hasil penelitian menjawab persoalan utama penelitian bahwa kemampuan Satgas Pamtas telah mampu menjalankan tugas pengamanan secara cukup baik, tetapi belum optimal karena terdapat kesenjangan antara kemampuan personel dengan dukungan organisasi dan lingkungan operasional. Peningkatan kemampuan membutuhkan pendekatan yang terpadu antara penguatan sumber daya manusia, teknologi, dukungan logistik, pola operasi, koordinasi kelembagaan, dan pendekatan sosial kepada masyarakat perbatasan.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan Satgas Pamtas TNI AD dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste secara umum berada pada kategori cukup baik. Kemampuan tersebut ditunjukkan melalui penguasaan teknis, ketahanan fisik, kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis dan sosial, serta komunikasi persuasif dengan masyarakat perbatasan. Namun, kemampuan tersebut belum optimal karena masih terdapat keterbatasan jumlah dan pemerataan kemampuan personel, sarana dan prasarana, sistem komunikasi, teknologi pengawasan, kondisi geografis yang sulit, serta koordinasi lintas instansi yang belum sepenuhnya terpadu. Strategi peningkatan kemampuan Satgas Pamtas perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan kapasitas personel, peningkatan kualitas latihan praturgas berbasis karakteristik medan, penguatan kepemimpinan lapangan, optimalisasi pola operasi, pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan sistem komunikasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat perbatasan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengamanan perbatasan tidak hanya bergantung pada kemampuan personel, tetapi juga pada keselarasan antara tujuan, cara, dan sumber daya yang tersedia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas serta fokus penelitian pada satu konteks penugasan pengamanan perbatasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan cakupan wilayah dan informan yang

lebih luas untuk mengukur hubungan antara kemampuan personel, dukungan teknologi, sarana prasarana, koordinasi lintas instansi, dan efektivitas pengamanan perbatasan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian, khususnya para informan, unsur satuan dan masyarakat di wilayah penelitian, serta pihak-pihak yang telah membantu proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

BIBLIOGRAPHY

- Adiwisuda, B. (2025). TNI dan penanganan kejahatan transnasional: Studi kasus di perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4578>
- Arvanti, A., Setiawan, B., Syamsunasir, & Widodo, P. (2023). Dynamics of border conflict resolution between Indonesia-Timor Leste. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.579>
- Atikawati, D., Harahab, N., Caesar, N. R., Puspitawati, D., Muflihulafi, D. A., Supriyadi, Wardana, N. K., Hakim, A. I., Fathah, A. L., Putri, B. M., Isdianto, A., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2024). Political and ideological vulnerabilities in Indonesia's border with Timor-Leste to support state resilience and security: A study on Belu and Malaka Regencies. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6). <https://doi.org/10.18280/ijsdp.190630>
- Djong, S. S., & Damayanti, A. (2023). The roles of Atambua Customs and challenges in dealing with garment smuggling in Indonesia-Timor Leste border area. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(1), 1343–1357. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v11i01.sh02>
- Mahendrawati, N. L. M., Pandit, I. G. S., Sujana, I. N., Nahak, S., Soares, C. A., & Telman, A. M. (2021). Law enforcement of illegal business transaction on the border area between Indonesia and Timor Leste in a dilemma. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 115–138. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.115-138>
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation of Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) agreement between Indonesia-Timor Leste in the resolution of the land border dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.800>
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Hartana, Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). Land border dispute resolution model in the involvement of customary leaders between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave area. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 329–356. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.15606>
- Mauk, A. D., Luan, R. T. N. P., Bano, A. E. B., Suhardjana, F. E., & Arman, Y. (2023). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan masalah pelintas batas Indonesia-Timor Leste. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Nurisnaeny, P. S., Damayanti, A., Mubaroq, S. R., & Perdana, I. A. (2025). The sovereignty and kinship challenge: Addressing Indonesia-Timor Leste border security in the post-conflict era. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(3), 40–58. <https://doi.org/10.35879/jik.v19i3.690>
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/12/VII/2007 tentang Operasi Pengamanan Perbatasan.
- Raharjo, S. N. I. (2016). Managing conflict through cross-border cooperation: A study at the Indonesia-Timor Leste border. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(1).

- Rokhanyah, A., et al. (2023). Collaborative policy between Indonesia and Timor-Leste in reducing smuggling at the border area. *Jurnal Pemerintahan dan Demokrasi*, 3(2).
- Sunyowati, D., Ariadhi, P. P. P., Romadhona, M. K., & Alfadhel, A. B. B. (2023). Indonesia-Timor Leste maritime boundaries on exclusive economic zone: Equitable principle. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 347–372. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.66126>
- Sutaji, S., Lazuardi, R., & Bandur, A. (2022). Analisis penggunaan teknologi pesawat tanpa awak dalam mendukung operasi pengamanan di wilayah perbatasan darat RI-RDTL. *Jurnal Teknologi*, 14(1).
- Tampubolon, D., et al. (2024). Pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam perspektif pertahanan dan keamanan negara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.